PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENJUALAN MINYAK GORENG CURAH BERLABEL MEREK PREMIUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Studi Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2022/PN.Bnr)

Oleh:
Assifa Rahma Qotrunnada
E1A019299

ABSTRAK

Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak diperbolehkan melanggar hak-hak konsumen sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun pada kenyataannya pelaku usaha kerap kali tidak menjalankan kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian pada konsumen. Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap konsumen penjualan minyak goreng curah berlabel premium yang bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen penjualan minyak goreng curah berlabel premium dalam Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, metode pendekatan undang-undang, spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yang disajikan melalui uraian secara sistematis dan logis dengan teks naratif, dan dianalisis secara normatif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, konsumen mendapat perlindungan hukum berdasarkan Pasal 142 jo. Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Putusan ini memberikan upaya perlindungan hukum terhadap konsumen penjualan minyak goreng curah berlabel premium atas hak konsumen yang terdapat dalam Pasal 4 huruf a dan c Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terhadap tanggung jawab pelaku usaha telah terpenuhi dengan dijatuhkannya pidana penjara.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Konsumen, Minyak Goreng Curah*.

LEGAL PROTECTION OF CONSUMERS FOR SALE OF UNBRANDED OIL WITH PREMIUM BRAND LABELS BASED ON REGULATIONS NUMBER 8 OF 1999 CONSUMER PROTECTION

(Study of Decision Number: 50/PID.SUS/2022/PN.BNR)

by :

Assifa Rahma Qotrunnada

E1A019299

ABSTRACT

The entrepreneur, in carrying out his business activity, is not allowed to violate consumer rights as listed in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, but in fact the entrepreneur does not perform his obligations so that it causes losses to the consumer. This study examines the legal protection of consumers for the sale of premium labeled fried oil and aims to know the legal protections and liability of entrepreneurs for consumers in the sale of premium labeled fried oil in the Decision Number: 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr revised from the Consumer Protection Act.

This research uses types of normative juridic research, methods of legal approach, and specifications of analytical descriptive research. The data used is secondary data, collected using library studies, presented through systematic and logical methods with narrative texts, and analyzed qualitatively and normatively.

Based on the results of research and data analysis, consumers are entitled to legal protection under Article 142 jo, Article 91 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia No. 18 of 2012 on Food as amended by the Law on Labour, No. 11 of 2020, Article 62 paragraph (1). Article 8 paragraph 1 letter a of Law No. 8 of 1999 of the Republic of Indonesia on Consumer Protection This judgment provides a legal protection effort against consumers of the consumer's rights contained in Article 4 letters a and c of the Consumer Protection Act, against the responsibility of the entrepreneur to be fulfilled by being sentenced to imprisonment.

***Keyword**: Legal Protection, Consumer Protection, Unbranded Oil.*